

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan objek wisata Telaga Menjer termasuk pengelolaan triple helix yang memadukan keterlibatan tiga *stakeholder* terdiri dari pemerintah (Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo), dunia usaha (PT Indonesia Power, Bumdes Sumber Lancar Desa Maron, dan Investor atau Pemodal), serta komunitas (Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan). *Stakeholder* tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder atau pendukung.
 - a. *Stakeholder* primer terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, PT Indonesia Power, Bumdes Sumber Lancar Desa Maron, Karang Taruna Desa Maron, dan Kelompok Nelayan.
 - b. *Stakeholder* kunci terdiri dari PT Indonesia Power.
 - c. *Stakeholder* sekunder atau pendukung terdiri dari Pemerintah Desa Maron.

Adapun identifikasi *stakeholder* berdasarkan matriks *power versus interest grid* mengklasifikasikan *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer, meliputi *context setter* terdiri dari Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. *Players* terdiri dari PT Indonesia Power, Bumdes Sumber Lancar Desa Maron, dan Karang Taruna Desa. *Subject* dalam pengelolaan Telaga Menjer terdiri dari Investor atau Pemodal dan Kelompok Nelayan.

2. Peran *stakeholder* diklasifikasikan menjadi lima, meliputi *policy creator*, koordinator, implementor, fasilitator, dan akselerator.
- a. *Stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer bertugas membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait pengelolaan wisata Telaga Menjer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Policy creator* terdiri dari pemerintah (Pemerintah Desa Maron, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo), dan dunia usaha (PT Indonesia Power).
 - b. *Stakeholder* yang berperan sebagai implementor dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer bertugas melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan. Implementor terdiri dari pemerintah (Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo), dunia usaha (Bumdes Sumber Lancar Desa Maron), dan komunitas (Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan).
 - c. *Stakeholder* yang berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer bertugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* yang lain. Koordinator terdiri dari pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo), dunia usaha (PT Indonesia Power dan Bumdes Sumber Lancar Desa Maron), serta komunitas (Karang Taruna Desa Maron).
 - d. *Stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer bertugas memberikan fasilitas baik fasilitas pokok maupun

penunjang di objek wisata Telaga Menjer. Fasilitator terdiri dari Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo), dan komunitas (Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan).

- e. *Stakeholder* yang berperan sebagai akselerator dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer bertugas memberikan kontribusi berupa bantuan dana untuk mendorong keberhasilan pengelolaan wisata Telaga Menjer. Akselerator yaitu pihak swasta atau dunia usaha (PT Indonesia Power).

Peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer belum dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya tumpang tindih peran pada setiap *stakeholder* yaitu satu *stakeholder* yang melaksanakan lebih dari satu peran, dan pengelolaan wisata Telaga Menjer ini juga masih didominasi oleh pihak swasta atau dunia usaha yaitu PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan dan berkepentingan sangat besar untuk operasional pembangkit listrik tenaga air, sehingga wisata Telaga Menjer tidak dapat berkembang dengan baik secara maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai identifikasi *stakeholder* dan peran *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer, berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian terkait *stakeholders mapping* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer.

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang bersifat proaktif antara *stakeholder* yang satu dengan yang lain dengan penanggung jawab yang jelas,

sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih peran dan tugas diantara *stakeholder* terkait. Bentuk koordinasi dan kerjasama yang dapat dilakukan antara lain melalui berbagai macam pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan pemahaman semua pihak berkaitan dengan apa yang dilakukan, dan menyamakan sudut pandang dari semua *stakeholder* yang terlibat.

2. Membentuk organisasi atau lembaga masyarakat yang berfokus terhadap pengelolaan wisata Telaga Menjer sebagai wadah terintegrasinya semua *stakeholder* yang terlibat, dengan struktur organisasi dan pembagian pekerjaan yang jelas, sehingga diharapkan dapat meminimalisir timbulnya konflik yang dapat menghambat perkembangan wisata Telaga Menjer.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait peran dan tanggung jawab sebagai *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer dengan menyamakan persepsi dan tujuan semua *stakeholder* terhadap pengelolaan yang dilakukan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berkala dengan semua *stakeholder* secara terhadap pengelolaan wisata Telaga Menjer dari aspek jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan, kepuasan wisatawan, dan kondisi objek wisata Telaga Menjer.